

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH^P
DALAM PEMBUATAN PELAPORAN REKAPITULASI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN (P6/P7)
ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(STUDI KASUS PADA KANTOR TATA USAHA ANGGARAN
SURABAYA II)**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI



DIAJUKAN OLEH

AHMAD SOBARI

No. Pokok : 049721398-E

KEPADA

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DALAM PEMBUATAN PELAPORAN REKAPITULASI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN (P6/P7)
ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(STUDI KASUS PADA KANTOR TATA USAHA ANGGARAN SURABAYA II)**



DIAJUKAN OLEH :

AHMAD SOBARI

No. Pokok : 049721398 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Erina Sudaryati".

Dra. ERINA SUDARYATI, Msi. Ak

TANGGAL

KETUA PROGRAM STUDI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arsono Laksmna".

Dr. ARSONO LAKSMANA, SE., Ak

TANGGAL ..23-03-2001.....

ABSTRAKSI

Keberadaan organisasi non – profit di masyarakat sangat berarti karena organisasi non profit didirikan untuk melayani kepentingan umum. Salah satu bentuk organisasi non profit adalah pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatannya, baik rutin maupun pembangunan dibiayai melalui APBN, yang bersumber dari Penerimaan dalam negeri seperti pajak, minyak, cukai dan lain-lain.

Akuntansi Pemerintah sebagai sebuah sistem dalam perkembangannya membahas bagaimana pemerintah suatu negara mengatur konsep keuangannya secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan, juga bagaimana mengatur pembukuan (akuntansi) nya secara berkesinambungan dan seragam antar unit instansi pemerintah baik berjenjang maupun paralel. Dengan demikian Laporan Akuntansi yang dibuat diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan komunikatif, sehingga dapat dimanfaatkan secara tepat oleh instrumen-instrumen pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan berkenaan.

Pemerintah selaku pelaksana pembangunan tentunya juga memerlukan suatu Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai salah satu mekanisme informasi akuntansi. Sistem akuntansi tersebut diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.